

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA**

# **BPKD**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011  
Pangandaran 46394 - Jawa Barat

---

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts. 127 -BPKD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BPKD KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Kerja BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk

- Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
  36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);
  37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Diktum KESATU *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKD Tahun 2022

- sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada DPA BPKD Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 3 September 2021

**KEPALA BPKD  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**HENDAR SUHENDAR S**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KAB. PANGANDARAN  
NOMOR : 050/Kpts. 127 -BPKD/2021  
TANGGAL : 3 September 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BPKD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan  
II. Ketua : Sekretaris  
III. Sekretaris : Fungsional Perencana  
IV. Anggota : 1. Semua Kepala Bidang;  
2. Semua Kasubid dan Kasubag;  
3. Semua Fungsional Umum;  
4. Operator Perencanaan;  
5. Operator Keuangan;  
6. Operator BMD.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 3 September 2021

**KEPALA BPKD  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**HENDAR SUHENDAR S**



# PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011  
Pangandaran 46394 - Jawa Barat

---

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR :050/Kpts.129.a/BPKD/2021

### TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Rencana dan Strategi BPKD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;
  - b. bahwa Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran Nomor: 050/Kpts. 115 /BPKD/2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Kerja BPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang

- Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset di Daerah;
2. Kepala BPKD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin BPKD;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2022, yang selanjutnya disebut Perubahan RENJA BPKD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Anggaran Tahun 2022.

**BAB II  
SISTEMATIKA RENJA  
Pasal 2**

Sistematika Renja sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 terdiri dari:

- BAB I**   Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II**   Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III**   Tujuan dan Sasaran BPKD
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV**   Rencana Kerja dan Pendanaan BPKD
- BAB V**   Penutup

**BAB III  
ISI DAN URAIAN RENJA  
Pasal 3**

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 4**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 BPKD dan menjadi tolok ukur

pertanggungjawaban kinerja tahunan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BPKD Kabupaten Pangandaran

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran Tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 dinyatakan berlaku hingga penyusunan LAKIP/LKPJ Tahun 2022

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala BPKD ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKD.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021

KEPALA BPKD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

**HENDAR SUHENDAR S**

## KATA PENGANTAR

**P**enyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Khusus untuk Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran.

Lebih lanjut isi dari Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) dan Perubahannya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 7 Oktober 2021  
KEPALA BPKD  
KABUPATEN PANGANDARAN

**Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19641116 199303 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	12
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah .....	17
3.3 Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	19
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	47
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memberikan implikasi secara langsung terhadap semakin luasnya cakupan perencanaan daerah. Adanya peralihan yang bersifat desentralistik ini kian menegaskan kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan Daerah di bidang keuangan, pengelolaan aset dan pendapatan daerah dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga produk perencanaan yang dihasilkan mampu memenuhi tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat yang kian berkembang.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diatas, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah itu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja oleh tiap-tiap SKPD. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna/arti bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dilakukan dengan melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang terbagi menjadi *common goals* yang merupakan kegiatan lintas sektor dan memerlukan sinergitas yang tinggi lintas Perangkat daerah (PD), serta prioritas pembangunan *non common goals* yang merupakan kegiatan sektoral yang dikerjakan oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran



Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten



- Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4)
  33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang



- Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
  35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);
  36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 45).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2022. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- d. Menciptakan alokasi sumber daya pembangunan daerah secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, sebagai pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**



- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan tujuan, sasaran dan prioritas program dan kegiatan.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## BAB II

### HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan perlu dilaksanakan oleh BPKD sebagai institusi Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Evaluasi ini diawali dengan kegiatan pemantauan atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik melalui pengamatan lapangan maupun analisis terhadap laporan triwulan.

Evaluasi ini dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berasal dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

Pada umumnya pencapaian realisasi keuangan maupun fisik belum mencapai target, hal tersebut disebabkan oleh beberapa mekanisme dan proses administrasi. Dengan demikian kondisi tersebut berdampak pada pencapaian/realisasi fisik serta keuangan masing-masing kegiatan.

Untuk kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2021 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Gambaran lengkap dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 tersebut disajikan dalam tabel T-C.29. dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

(Terlampir)



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BPKD disajikan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.  
(Terlampir)

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah lingkup Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam hal ini mengkoordinasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Untuk perencanaan jangka panjang adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan tingkat menengah adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan dengan adanya dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang melalui rapat forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengkoordinasikan usulan program kegiatan hasil forum Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan penyusunan RKPD. RKPD ini dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia sehingga memperlambat proses penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah.

Untuk mengatasinya dilaksanakan Peningkatan Profesionalisme aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan



optimalisasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada pelaporan keuangan daerah.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan hasil Review terhadap Rancangan awal RKPD, untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah antara program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.  
(Terlampir)

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah terdapat 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Sub Kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan maupun dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah. Adapun prosesnya usulan tersebut diperoleh dari musrenbang di tingkat desa kemudian dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan. Program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang tingkat kecamatan tersebut kemudian disampaikan di musrenbang di tingkat kabupaten.

**(Tabel. T-C 32)**

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus diemban yakni:

- ✚ Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- ✚ Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya saing.
- ✚ Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- ✚ Misi 4 : Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- ✚ Misi 5 : Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- ✚ Misi 6 : Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- ✚ Misi 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- ✚ Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- ✚ Misi 9 : Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk melaksanakan misi ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang meliputi :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan  
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan  
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. SDM yang berkualitas dan berdaya saing  
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan



layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

4. Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.

5. Infrastruktur untuk dan Pelayanan Dasar

Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

### 3.1.1. Prioritas Pembangunan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 adalah **"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"** dengan Misi sebagai berikut:

1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah;
4. Meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk tahun 2022 adalah:

**“Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”**

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, maka terdapat alternatif tema pembangunan RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat yakni:

1. Prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat.
2. Mewujudkan “Jabar Juara” dalam peningkatan kesejahteraan terutama pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Untuk mencapai alternatif tema tersebut maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
12. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

### 3.1.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya



ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 adalah:

**“Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal”**

Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan layanan kesehatan dan ketertiban pada sektor destinasi pariwisata;
2. Peningkatan promosi dan perbaikan sarana dan prasarana destinasi pariwisata;
3. Pemberian subsidi dan bantuan kepada pelaku usaha yang mendukung pariwisata;
4. Peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan;
5. Optimalisasi destinasi pariwisata unggulan;
6. Gerakan membangun desa wisata.

**Sasaran Prioritas :**

- a) Makin meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- b) Makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang valid dan up to date.
- c) Makin efektifnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik.

**Arah Kebijakan Prioritas :**

- a) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal.
- b) Penataan otonomi daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dan peningkatan efisiensi dan



efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilukada 2020.

- c) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.
- d) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.
- f) Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang dilanjutkan dengan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sebagai rencana dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. Program dan kegiatan prioritas ini merupakan program yang ditentukan sesuai dengan misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun Tujuan dan Sasaran sesuai misi antara lain sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

Sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat;
3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan BMD;



4. Meningkatnya pajak daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Untuk Tahun 2022, program kegiatan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan APBD
- d. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
- e. Peningkatan pengelolaan aset daerah

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Sub Kegiatan. Untuk lebih rincinya bisa dilihat pada Tabel T-C.33

Tabel T-C.33.

(Terlampir)



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pendanaan untuk keseluruhan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersumber pada APBD Kabupaten Pangandaran.

Perubahan Rencana Kerja program dan kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran Rp. 15.865.748.431,00 yang diimplementasikan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 96.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Renstra, Renja, RKT, RKA/DPA BPKD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 4 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan BPKD. Uraian dari kegiatan ini melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan keuangan dan aset sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 67.400.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah



Tersedianya Data laporan capaian kinerja SKPD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 4 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan capaian Kinerja BPKD. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sehingga bisa dijadikan evaluasi pada program dan kegiatan yang tidak mencapai target dan realisasi fisik 100% juga untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing program dan kegiatan dibidang-bidang.

- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 12.135.886.805,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 60 Orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara berkala setiap bulan.
- 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Jumlah Anggaran Rp 66.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terkelolanya Laporan Keuangan Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan SPP/SPM Belanja.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 10.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya administrasi laporan keuangan akhir tahun. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Penyusunan laporan Keuangan pada tahun anggaran sebelumnya dan dijadikan bahan evaluasi pada program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran, dengan jumlah anggaran



yaitu sebesar Rp 10.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tercapainya ketepatan pelaporan keuangan SKPD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 3 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan laporan keuangan semesteran yang dijadikan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan persemester sehingga bisa mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut efisiensi, efektif dan transparan dan akuntabel dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas disesuaikan dengan realisasi anggaran program dan kegiatan.

- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 10.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tercapainya ketepatan pelaporan keuangan SKPD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan analisis prognosis realisasi anggaran. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan laporan keuangan semesteran yang dijadikan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan persemester sehingga bisa mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut efisiensi, efektif dan transparan dan akuntabel dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas disesuaikan dengan realisasi anggaran program dan kegiatan.
- 8) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan jumlah Anggaran Rp 62.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya penatausahaan aset daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 3 jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terkelolanya Laporan Aset Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah tersedianya barang milik daerah yang dikelola.
- 9) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan jumlah Anggaran Rp 84.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pelaporan penatausahaan retribusi daerah.



Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 11 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan pengelolaan Retribusi Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan laporan pengelolaan retribusi daerah.

- 10) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Jumlah Anggaran Rp 50.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini meningkatnya kualitas kinerja perkantoran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 165 Stel. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk memfasilitasi kegiatan perkantoran.
- 11) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan jumlah Anggaran Rp 99.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan laporan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.
- 12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Jumlah Anggaran Rp 9.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 6 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah Anggaran Rp 300.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor. Uraian



- dari kegiatan ini adalah menyediakan Peralatan dan perlengkapan Kantor.
- 14) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Jumlah Anggaran Rp 50.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan barang cetak yang dibutuhkan untuk kepentingan kantor dan melaksanakan penggandaan dokumen.
  - 15) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Anggaran Rp 7.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Surat Kabar Pikiran Rakyat, Kabar Priangan, Pangandaran News, Harapan Rakyat, Radar dan Bahan Bacaan seperti buku Perundang-undangan . Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah Anggaran Rp. 360.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 120 Laporan. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah memfasilitasi pegawai untuk rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
  - 17) Pengadaan Mebel. Jumlah Anggaran Rp 100.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 15 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah penyediaan mebel. Uraian dari kegiatan ini adalah



- menyediakan mebel kantor untuk memfasilitasi kegiatan perkantoran.
- 18) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya. Jumlah Anggaran Rp. 125.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 25 unit peralatan mesin kantor lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan mesin kantor lainnya. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan Peralatan mesin kantor lainnya.
- 19) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah Anggaran Rp 340.189.642,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 3 unit bangunan gedung kantor. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah bangunan gedung kantor. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan bangunan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan perkantoran.
- 20) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah Anggaran Rp. 4.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1.100 Buah. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat untuk administrasi perkantoran. Uraian dari kegiatan ini adalah membuat surat konsep surat yang akan dikirim kemudian di ketik, diagenda dan dikirimkan dan menerima surat masuk kemudian diagenda, didisposisi, didistribusikan dan diarsipkan.
- 21) Penyediaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jumlah Anggaran Rp. 550.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 4 Rekening. Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening telpon, air, internet/faximile dan listrik. Uraian dari kegiatan ini



adalah membayar tagihan rekening listrik, telepon, air dan internet.

- 22) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah Anggaran Rp. 529.200.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 12 Orang makanan dan minuman dan jumlah orang yang melaksanakan jasa pelayanan umum kantor. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Makanan dan Minuman dan orang yang melaksanakan tugas pelayanan umum kantor. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan makanan dan minuman tamu, rapat dan kegiatan serta menyediakan orang sebagai pelaksana jasa pelayanan umum kantor.
- 23) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Jumlah Anggaran Rp 317.471.984,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 65 unit kendaraan yang diservis dan berizin dan 65 unit mobil jabatan yang dipelihara. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perorangan/operasional. Uraian dari kegiatan ini adalah membayar pajak kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan dinas.
- 24) Pemeliharaan Mebel. Jumlah Anggaran Rp. 22.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 15 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebel. Uraian dari kegiatan ini adalah untuk memelihara Mebeleur secara rutin/berkala.
- 25) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Jumlah Anggaran Rp. 260.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan



tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 7 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan mesin lainnya. Uraian dari kegiatan ini adalah untuk memelihara peralatan dan mesin lainnya secara rutin/berkala.

- 26) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 7 Unit gedung kantor. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya. Uraian dari kegiatan ini adalah untuk memelihara gedung kantor dan bangunan lainnya secara rutin/berkala.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran Rp. 237.263.077.537,00 yang diimplementasikan ke dalam 5 (lima) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS. Jumlah Anggaran Rp. 250.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan dan penganggaran secara tertib akuntabel dan transparan.. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 2 dokumen Perencanaan KUA dan PPAS Murni. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah Memberikan acuan dan pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran tentang KUA dan PPAS Murni sehingga tujuan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat tercapai, yaitu terdapatnya dokumen perencanaan dan penganggaran tentang KUA dan PPAS Murni yang sinkron dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.



- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Jumlah Anggaran Rp. 250.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan dan penganggaran secara tertib akuntabel dan transparan. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 2 dokumen Perencanaan KUA dan PPAS Perubahan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah Memberikan acuan dan pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran tentang KUA dan PPAS Perubahan sehingga tujuan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat tercapai, yaitu terdapatnya dokumen perencanaan dan penganggaran tentang KUA dan PPAS Perubahan yang sinkron dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.
- 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD. Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah kesesuaian penganggaran dengan ketentuan pedoman penyusunan anggaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya RKA SKPD dan yang di asistensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan dan verifikasi terhadap RKA SKPD, menguji kepatuhan terhadap pedoman, peraturan, menguji kewajaran, kepatutan dan konsistensi terhadap dokumen perencanaan lainnya.
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD. Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah kesesuaian penganggaran dengan ketentuan pedoman penyusunan anggaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Perubahan RKA SKPD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian dari kegiatan ini adalah



melakukan penyusunan dan verifikasi terhadap Perubahan RKA SKPD, menguji kepatuhan terhadap pedoman, peraturan, menguji kewajaran, kepatutan dan konsistensi terhadap dokumen perencanaan lainnya.

- 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD. Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah kesesuaian penganggaran dengan ketentuan pedoman penyusunan anggaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya DPA SKPD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan dan verifikasi terhadap DPA SKPD, menguji kepatuhan terhadap pedoman, peraturan, menguji kewajaran, kepatutan dan konsistensi terhadap dokumen perencanaan lainnya.
- 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD. Jumlah Anggaran Rp. 250.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah kesesuaian penganggaran dengan ketentuan pedoman penyusunan anggaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Perubahan DPA SKPD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan dan verifikasi terhadap Perubahan DPA SKPD, menguji kepatuhan terhadap pedoman, peraturan, menguji kewajaran, kepatutan dan konsistensi terhadap dokumen perencanaan lainnya.
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Jumlah Anggaran Rp 502.559.179,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset secara tertib akuntabel dan transparan. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 2 dokumen Raperbup/Perbup dan 2 Raperda/Perda. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan



Anggaran (DPA). Uraian dari kegiatan ini adalah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD agar diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta memberikan acuan dan pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan daerah tentang APBD yang sinkron dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya dan memberikan acuan dan pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah KHD tentang APBD sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan daerah tentang APBD yang sinkron dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

- 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. Jumlah Anggaran Rp 502.559.179,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kinerja pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset secara tertib akuntabel dan transparan. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 12 dokumen Raperbup/Perbup dan 6 dokumen Raperbup/Perbup 2 dokumen Raperda/Perda. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Uraian dari kegiatan ini adalah Menyusun dan merancang perubahan APBD Apabila APBD yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang telah direncanakan dan Memberikan acuan dan pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah KHD tentang



Perubahan APBD sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan daerah tentang APBD yang sinkron dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

- 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran. Jumlah Anggaran Rp. 150.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah SKPD yang mengikuti Diklat/Pelatihan Manajemen Anggaran Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Pelatihan dan seminar dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam manajemen pengelolaan anggaran daerah dengan aplikasi. Untuk membangun mindset baru mengenai sistem anggaran dan sistem hubungan birokrasi pemerintah yang moderen.
- 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan. Jumlah Anggaran Rp. 204.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset secara tertib akuntabel dan transparan. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Tentang kajian tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah menyusun dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta memberikan acuan dan pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sinkron dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan lainnya.



- 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah. Jumlah Anggaran Rp 235.400.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan Update sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara berkala serta Meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan SKPD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 93 Desa. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparatur desa terhadap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terpeliharanya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah serta Menigkatnya sinergitas antar lembaga pengelolaan Anggaran Belanja daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efidiensi pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan desa sehingga terciptanya hubungan birokrasi desa dan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan transparan, serta terciptanya tertib administrasi dalam proses dan sistem penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan melakukan Pemeliharaan dan Update Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga menciptakan teknologi yang modern dengan sistem dan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melakukan sinergitas sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja daerah.
- 12) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan. Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Update sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara berkala serta Meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan SKPD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparatur SKPD terhadap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan terpeliharanya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah serta Menigkatnya sinergitas antar lembaga



pengelolaan Anggaran Belanja pembiayaan. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penatausahaan Pengelolaan Keuangan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sehingga terciptanya hubungan birokrasi dan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan transparan, serta terciptanya tertib administrasi dalam proses dan sistem penatausahaan pengelolaan keuangan dan melakukan Pemeliharaan dan Update Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga menciptakan teknologi yang modern dengan sistem dan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melakukan sinergitas sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pembiayaan.

- 13) Pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 100.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 72 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya bimbingan teknis penganggaran daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Bimbingan Teknis Penganggaran Daerah sehingga dapat meningkatkan pemahaman pengelola keuangan dalam penyusunan anggaran SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan bagi aparatur dalam pengelolaan anggaran daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Pembinaan bagi aparatur pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat meningkatkan pemahaman pengelolaan anggaran dalam penyusunan anggaran SKPD.
- 14) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah. Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya penatausahaan keuangan BUD dan Meningkatnya penatausahaan kas umum daerah serta Meningkatnya evaluasi dan pengembangan pelaksanaan penatausahaan sistem transaksi non tunai. Target capaian kinerja dari kegiatan ini



adalah 12 Dokumen yang disusun dan 12 Dokumen laporan kas umum daerah yang disusun. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan Keuangan BUD, Terlaksananya Penatausahaan Kas Umum Daerah dan Terlaksananya pelaksanaan evaluasi dan pengembangan sistem Penatausahaan dengan sistem transaksi non tunai. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan verifikasi semua jenis pengajuan pencairan dari seluruh SKPD se-Kabupaten Pangandaran dan pengelolaan Keuangan BUD dan melakukan pengelolaan kas umum daerah serta melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan dan pengembangan sistem transaksi non tunai.

- 15) Penatausahaan Pembiayaan Daerah. Jumlah Anggaran Rp. 232.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pelaksanaan penatausahaan keuangan untuk belanja langsung secara berkala serta Meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan SKPD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 35 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparatur SKPD terhadap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan penatausahaan pembiayaan daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penatausahaan Pengelolaan Keuangan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan peningkatan penatausahaan pembiayaan daerah sehingga terciptanya hubungan birokrasi dan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan transparan, serta terciptanya tertib administrasi dalam proses dan sistem penatausahaan pengelolaan keuangan sehingga menciptakan teknologi yang modern dengan sistem dan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melakukan sinergitas sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pembiayaan.
- 16) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 260.400.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Jumlah SP2D



SKPD/SKPKD yang diterbitkan dengan kelengkapan data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan dan pemotongan dengan instansi terkait. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 4700 SP2D. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terkelolanya Penatausahaan SP2D SKPD/SKPKD. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan kegiatan rekonsiliasi pencetakan SP2D dan melaksanakan pengelolaan belanja-belanja diseluruh SKPD di Kabupaten Pangandaran.

- 17) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Jumlah Anggaran Rp. 172.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan SKPD penghasil meliputi realisasi pendapatan pada APBD dari hasil rekonsiliasi pendapatan daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 9 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Realisasi pendapatan pada APBD sebagai hasil rekonsiliasi pendapatan yang sudah dilaksanakan. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan penatausahaan Laporan Realisasi pendapatan dengan tujuan mengevaluasi realisasi pendapatan apakah telah mencapai target sesuai dengan rencana anggaran, selanjutnya laporan realisasi ini dipergunakan untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan anggaran perubahan APBD.
- 18) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban. Jumlah Anggaran sebesar Rp 240.359.179,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD untuk penyusunan laporan akhir tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 35 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran



sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dilaksanakan untuk pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda, yaitu antara entitas akuntansi yaitu pada SKPD dan entitas pelaporan yang berada pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah).

- 19) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 350.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan realisasi APBD Semester I dan Prognosis 6 Bulan berikutnya. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya dengan tujuan mengevaluasi realisasi APBD Semester I apakah telah mencapai target sesuai dengan rencana anggaran, selanjutnya laporan realisasi ini dipergunakan untuk menjadi pertimbangan apakah dalam 6 bulan berikutnya SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dapat menyelesaikan APBD 2020 ini sesuai dengan rencana anggaran. Ini juga menjadi bahan pertimbangan seberapa besar perubahan anggaran yang akan ditetapkan pada APBD Perubahan.
- 20) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 948.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersajinya laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan akhir tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran (LKPD) dan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun



Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dilaksanakan untuk pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda, yaitu antara entitas akuntansi yaitu pada SKPD dan entitas pelaporan yang berada pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah).

- 21) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 520.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan laporan. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen raperda dan 1 dokumen raperbup. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2020 setelah LKPD Audited.
- 22) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 200.000.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya penatausahaan Belanja Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan dan proses jumlah tahapan pengajuan. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 93 Proposal. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan Belanja, Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan. Uraian dari kegiatan ini



adalah melakukan pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

- 23) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 7.500.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dana darurat dan mendesak untuk masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan kejadian luar biasa di Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Tahun. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya dana darurat dan mendesak di Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- 24) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 23.163.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 93 Proposal. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.
- 25) Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 96.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan data hasil inventarisasi dan analisis belanja hibah bansos yang disusun. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 12 Laporan hibah, bansos, 4 Laporan LKT DAN 2 Laporan realisasi DBH CHT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan data hibah bansos. Uraian dari kegiatan ini adalah Penyusunan laporan belanja hibah bansos yang dilaksanakan setiap bulan untuk seluruh SKPD se-Kabupaten Pangandaran.
- 26) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 134.400.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Aplikasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan



ini adalah Terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi pemeliharaan pembaharuan dan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus: 1). Melakukan pemeliharaan pada server dan jaringan serta 2). Melakukan pemeliharaan dan *update* pada *client* agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 3.327.559.179,00 yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah. Jumlah Anggaran Rp 37.559.179,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen. Hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen berkas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan perencanaan tentang kebutuhan barang milik daerah Kabupaten Pangandaran.
  - 2) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 50.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan public dan Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah tersedianya aturan/peraturan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah.
  - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 90.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan



anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan public dan Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah jumlah aset dan barang milik daerah yang diselesaikan. Uraian dari kegiatan ini adalah Memfasilitasi Kegiatan penyelesaian aset dan Barang-Barang Milik Daerah sebagai bahan laporan aset di Lingkup Pemerintah Kabupaten.

- 4) Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran Rp 930.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Laporan. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini adalah Menyusun dokumen laporan inventarisasi barang milik daerah Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.
- 5) Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran Rp 520.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan public, Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan public dan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 140 Bidang Tanah, 8 Kasus. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah, Tersedianya kegiatan Majelis TPTGR dan Tersedianya kegiatan Penanganan kasus TPTGR. Uraian dari kegiatan ini adalah melaksanakan Pengamanan atas Aset Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran baik fisik maupun dokumen administrasi aset,



- menyelesaikan Kasus TPTGR dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan menyelesaikan Kasus TPTGR dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Jumlah Anggaran Rp. 1.050.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 6 Paket 15 Unit dan 1 Bidang tanah sewa. Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang beralih kepemilikan dari Ciamis ke Kabupaten Pangandaran dan jumlah lahan (PT KAI) yang tersedia. Uraian dari kegiatan ini adalah Beralihnya kepemilikan kendaraan dinas/operasional untuk pegawai di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran dan Penyelesaian Aset menertibkan administrasi pelaporan aset dan menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan aset dan tersedianya lahan Tanah PT. KAI yang saat ini digunakan untuk Relokasi.
  - 7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 250.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 35 Perangkat Daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah menertibkan administrasi pelaporan aset dan juga memantau belanja modal dan persediaan di setiap SKPD.
  - 8) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Laporan. Hasil yang



- dicapai dari kegiatan ini adalah Terupdatenya aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah menertibkan administrasi pelaporan aset dan juga memantau belanja modal dan persediaan di setiap SKPD.
- 9) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 35 Orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek. Uraian dari kegiatan ini adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan aset.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 3.963.908.825,00 yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) dan 12 (dua belas) sub Kegiatan yaitu sebagai berikut;
    - 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 516.600.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah dari aplikasi yang di kelola dan terlaksananya pendistribusian SPPT PBB. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 470 SPPT dan 1 Aplikasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah SPPT yang didistribusikan dan sitem aplikasi yang dikelola. Tercetaknya SPPT-PBB dan Terdistribusinya SPPT PBB dan tersedianya Blangko SPPT, DHKP, DHOP, DPH dan blanko pendukung. Uraian dari kegiatan ini adalah Menetapkan Pokok Ketetapan Pajak tahun 2020 dengan tujuan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat/Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan Mendistribusikan SPPT, DHKP, DHOP, DPH hasil cetak masal ke 93 Desa.
    - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran Rp



204.793.197,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah update sistem pengelolaan Pendapatan Asli daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 aplikasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terupdatenya Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan Sistem Informasi PBB-P2, Sasaran dari kegiatan ini system aplikasi yang update. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Aplikasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dan pendapatan PBB-P2. Uraian dari kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi PBB-P2 bekerjasama dengan pihak ke 3. melakukan fasilitasi pemeliharaan pembaharuan dan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan fokus: 1). Melakukan pemeliharaan pada server dan jaringan serta 2). Melakukan pemeliharaan dan *update* pada *client* agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Uraian dari kegiatan ini adalah memberikan pembinaan kepada wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi, pendataan, koordinasi dan pengawasan agar pemahaman dan kesadaran akan membayar pajak para wajib pajak meningkat dan tepat waktu.

- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 250.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Termotivasinya kecamatan dan desa dalam pembayaran pajak. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 250 Wajib Pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan pada tingkat Kecamatan dan Desa. Uraian dari kegiatan ini adalah melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dengan baik serta mengadakan pembinaan terhadap wajib pajak untuk memotivasi para kolektor desa dalam melaksanakan tugas dalam percepatan pelunasan target PBB nya.
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 50.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan



prasarana untuk pengelolaan pajak daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 20 unit dan 12 kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana alat sistem online dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran. Uraian dari kegiatan ini adalah melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pajak hotel dan restoran dengan baik secara online dalam percepatan pencapaian target.

- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp 155.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 aplikasi dan 1 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah aplikasi dan dokumen tentang data objek pajak yang dihasilkan. Uraian dari kegiatan ini adalah Melaksanakan pendataan potensi dari jenis pajak daerah sehingga menghasilkan analisis data potensi yang akurat untuk bahan acuan dalam meningkatkan penerimaan PAD. Maintenance Sistem Informasi PBB P2, sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengelolaan pendapatan Asli Daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Aplikasi, Printonik. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Aplikasi yang di update. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi pengembangan aplikasi pengelolaan sistem aplikasi PBB P2 agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 244.593.196,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pendapatan daerah melalui penilaian objek dan subjek pajak PBB P2. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 20.000 Objek Pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Ternilainya Obyek dan Subyek Pajak PBB P2. Uraian dari kegiatan ini adalah melaksanakan penilaian terhadap bangunan yang baru ataupun yang diperbaharui.
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Guna Tanah dan



Bangunan (BPHTB), dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 485.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pendapatan daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 486 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terkelolanya BPHTB. Uraian dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada para Wajib Pajak dan terjalin sinergitas yang baik dengan para Notaris/PPAT.

- 8) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 284.142.842,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya optimalisasi pengelolaan pendapatan pajak daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 6000 Objek Pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tercapainya pelaksanaan pelayanan untuk objek pajak daerah di Kabupaten Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak terhadap kebutuhan administrasi untuk penyetoran pajak.
- 9) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pendapatan asli daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1.500 Objek Pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Termonitornya Penagihan Pajak Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah memantau dan mencatat terhadap tingkat hunian hotel dan tingkat kunjungan restoran langsung ke objek pajak dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pemasukan pembayaran Pajak daerah yang dilaksanakan oleh Tim Khusus Pajak Daerah
- 10) Penagihan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 987.787.795,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tertagihnya pajak daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 4200 Dokumen, 93 Laporan Monitoring, 12 Laporan Realisasi PBB P2. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tertagihnya semua wajib pajak daerah di Kabupaten



Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak terhadap kebutuhan administrasi untuk penyetoran pajak. Monitoring Penagihan PBB P2, dengan sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pendapatan asli daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 12 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah laporan dari Jumlah Obyek pajak PBB P2 yang dimonitoring. Uraian dari kegiatan ini adalah memantau dan mencatat terhadap jumlah PBB P2 dan mengawasi jumlah setoran langsung ke wajib pajak pajak. Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa, dengan sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya optimalisasi peningkatan pendapatan pajak daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 93 Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengelolaan pendapatan pajak daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah Jumlah ketetapan data hasil pajak daerah dan Retribusi daerah tertentu kepada desa. Uraian dari kegiatan ini adalah Tersusunnya hasil pendapatan Bagi Hasil pajak dan Retrebusi Daerah kepada Desa. Melaksanakan pengawasan kepada desa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu yang diterima oleh Desa dalam pengelolaannya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan sehingga penyalahgunaan terhadap Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu dapat diantisipasi sedini mungkin dan pada akhirnya dapat direalisasikan dengan benar. Terkelolanya data hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu kepada desa.

- 11) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 151.969.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Terlaporkannya Dokumen Objek Pajak. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 345 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Permohonan Pemeriksaan Lapangan Atas Pembetulan, Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak. Uraian dari kegiatan ini adalah Memperbaiki data terkini



sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, memahami permasalahan di lapangan dan memberikan solusi penyelesaiannya serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penertiban Reklame, dengan sasaran dari kegiatan ini adalah Tertibnya reklame di Kabupaten Pangandaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 10 Reklame. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terasilinasinya penertiban reklame di Kabupaten Pangandaran. Uraian kegiatan ini adalah menertiban reklame yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- 12) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 433.222.795,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kesadaran wajib pajak. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 60 Wajib Pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelaksanaan pemeriksaan semua wajib pajak daerah di Kabupaten Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini adalah para petugas memeriksa kewajiban para wajib pajak dan juga memberikan pemahaman mengenai aturan perpajakan daerah sehingga meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan pajak daerah.



## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 merupakan rujukan terhadap pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam RENSTRA dan RKPD. Melalui perumusan Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan selain akan membantu meningkatkan kinerja aparatur di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah juga pada akhirnya dapat melahirkan produk pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Pada tahun 2022 dengan mengacu pada nomenklatur Program dan Kegiatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengagendakan 4 (empat) program untuk dilaksanakan yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh dukungan baik Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintahan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maupun pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.



Meskipun demikian, diakui pula bahwa untuk pencapaian Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah masih terdapat beberapa kendala antara lain : (1) kemampuan sumber aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah masih relatif terbatas dan (2) dukungan para pelaku pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam proses perencanaan dan koordinasi belum optimal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kendala ini adalah peningkatan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Melalui koordinasi ini diharapkan akan tercipta suatu keserasian baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Parigi, 7 Oktober 2021  
Kepala BPKD  
Kabupaten Pangandaran

**Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM**  
NIP. 19641116 199303 1 007

**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Pangandaran**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020							Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	95	100	89	100	112,36	90	0	94,73684211				
			100	100	95	100	105,26	96	100	96				
			96	100	79	100	126,58	80	75	83,33333333				
			97	89,78	89	89,78	100,88	90	75	92,78350515				
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	98	100	88	100	113,64	90	75	91,84				
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	98	100	88	100	113,64	90	100	91,84				
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	98	100	88	100	113,64	90	100	91,84				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	4	4	4	100,00	4	3	100,00					
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100,00	4	4	100,00					
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	99	100	78	100	128,21	80	75	80,81				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	420	40	50	40	80,00	50	40	11,90				
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30	5	5	5	100,00	5	5	16,67				
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	6	1	1	1	100,00	1	1	16,67				
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	72	3	3	3	100,00	12	9	16,67				
1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	6	0	1	0	0,00	1	0	16,67				
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	90	90	68	90	132,35	70	90	77,78				
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	18	3	3	3	100,00	3	3	16,67				
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	5	-15,27	5	15,27	305,40	5	-45,79	100,00				
1.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	66	11	11	11	100,00	11	11	16,67				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/comsums)/kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2011-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2020)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Pencapaian realisasi capaian target Daerah Desember 2020 s/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (2020)	Target Program dan Kegiatan Daerah (2021)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	99 %	100 %	87 %	100 %	114,94	90 %	75 %	90,91			
1.5.2	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Jumlah Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1080 Set	0 Set	155 Set	0 Set	0,00	155 Set	0 Set	14,35			
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	30 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	5 Laporan	16,67			
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	99 %	100 %	80 %	100 %	125,00	85 %	75 %	85,86			
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100,00	6 Jenis	6 Jenis	16,67			
1.6.2	Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perakitan dan Perlengkapan Kantor disediakan	690 Jenis	84 Jenis	90 Jenis	84 Jenis	93,33	90 Jenis	68 Jenis	13,04			
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	30 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100,00	5 Jenis	6 Jenis	16,67			
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	32 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100,00	4 Jenis	6 Jenis	12,50			
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	800 Laporan	79 Laporan	100 Laporan	79 Laporan	79,00	100 Laporan	42 Laporan	12,50			
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	36 %	8,17 %	18 %	8,17 %	45,39	20 %	22,22 %	55,56			
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0			
1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0			
1.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	111 Jenis	0 Jenis	10 Jenis	0 Jenis	0,00	10 Jenis	0 Jenis	9,01			
1.7.6	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin lainnya yang diadakan	217 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100,00	17 Unit	0 Unit	7,83			
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	18 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	2 Unit	16,67			
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	99 %	73,89 %	83 %	73,89 %	89,02	85 %	68,21 %	85,86			
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	7580 Buah	234 Buah	1080 Buah	234 Buah	21,67	1080 Buah	50 Buah	14,25			
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	24 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	100,00	4 Rekening	4 Rekening	16,67			
1.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	71 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100,00	11 Orang	11 Orang	15,49			
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	98 %	77,7 %	88 %	77,7 %	88,30	90 %	90 %	91,84			
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	435 Unit	37 Unit	60 Unit	37 Unit	61,67	60 Unit	42 Unit	13,79			
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	111 Jenis	0 Jenis	10 Jenis	0 Jenis	0,00	10 Jenis	0 Jenis	9,01			
1.9.6	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin lainnya yang dikelola	42 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	6 Jenis	85,71	7 Jenis	9 Jenis	16,67			
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	42 Unit	6 Unit	7 Unit	6 Unit	85,71	7 Unit	7 Unit	16,67			
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan sesuai waktu dan ketentuan	100 %	100 %	85 %	100 %	117,65	80 %	100 %	0,80			
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	1,00			
		Persentase PD yang mengfrnkan RKA dan DPA	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	1,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan/kegiatan (output))	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2011-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2020)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (2020)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase APBD yang sesuai ketentuan persentase APBD yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran	100 % 100	100 % 100	100 % 90	100 % 100	100,00 111,11	100% 92%	100 % 100	100 % %	100 % %	100,00 100,00			
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA, PPAS	2	2	2	2	100,00	2	2	2	2	100,00			
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA, PPASP	2	2	2	2	100,00	2	2	2	100,00				
2.1.3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	36	35	35	35	100,00	35	35	35	97,22				
2.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	36	0	35	0	0,00	35	35	35	97,22				
2.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di asistensi	36	0	35	0	0,00	35	35	35	97,22				
2.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi	36	0	35	0	0,00	35	35	35	97,22				
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbub dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2	1	2	1	50,00	2	2	2	100,00				
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperbub dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	6	1	2	1	50,00	2	2	2	33,33				
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperbub dan Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	12	12	12	12	100,00	12	12	12	100,00				
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Raperda dan Perda Tentang Perubahan APBD yang disusun	2	2	2	2	100,00	2	2	2	100,00				
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Regulasi yang disusun (SE Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD, Perbup Hibah Bansos, Perbup BTT, Perbup Penganggaran melewati Tahun Anggaran)	36	4	4	4	100,00	4	4	4	11,11				
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	25	25	25	25	100,00	25	25	25	100,00				
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	29	29	29	29	100,00	29	29	29	100,00				
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah apatur yang mendapatkan pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	0	35	0	0,00	35	35	35	48,61				
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	98	83,16	65	83,16	127,94	65	74,08	66,33					
2.2.3	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerimaan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Kas Umum Daerah Yang Disusun	12	12	12	12	100,00	12	12	12	100,00				
2.2.4	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah SKPD yang diterbitkan SPD dan Anggaran Kas nya	35	35	35	35	100,00	35	35	35	100,00				
2.2.5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang dikelola jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	8	8	8	8	100,00	8	6	100,00					
2.2.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	35	0	35	0	0,00	35	35	35	100,00				
		Jumlah sistem Transaksi Non Tunai	1	0	1	0	0,00	1	0	1	100,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outputsmosi)/kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2011-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2020)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Pencapaian realisasi capaian target Daerah, Desember, Revisi ke/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (2020)	Target Perangkat Daerah (2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pengungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen: Laporan Realisasi Gaji PNS, Laporan PPK, Rekonsiliasi Gaji, Rekonsiliasi PPK, Laporan Realisasi Gaji PNS	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0 Dokumen	100,00	
2.2.9	Rekonsiliasi Data penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang diterbitkan	4700 SP2D	3859 SP2D	4700 SP2D	3859 SP2D	82,11	4700 SP2D	3177 SP2D	100,00	
2.2.11	Pembinaan Penguasaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Penguasaan Keuangan Pemerintah Kabupaten	85 Orang	0 Orang	85 Orang	0 Orang	0,00	85 Orang	0 Orang	100,00	
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyempitan laporan keuangan sesuai SAP (Aktual)	100 %	85,71 %	70 %	85,71 %	122,44	70 %	71 %	70,00	
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	9 SKPD	9 SKPD	9 SKPD	9 SKPD	100,00	9 SKPD	0 SKPD	100,00	
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd	35 SKPD	35 SKPD	35 SKPD	35 SKPD	100,00	35 SKPD	1 SKPD	100,00	
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan Realisasi APBD Semester I	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
2.3.4	Kondisi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pengendalian yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyempitan anggaran belanja sesuai aturan	98 %	0 %	80 %	0 %	0,00	80 %	39,43 %	81,53 %	
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyajian Bantuan Keuangan	Jumlah aturan percairan dari 93 desa, kabupaten/provinsi	558 Proposal	0 Proposal	93 Proposal	0 Proposal	0,00	93 Proposal	17 Proposal	16,67 %	
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyediaan Dana Darurat	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0,00	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %	
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah aturan percairan dari 93 desa	558 Proposal	0 Proposal	93 Proposal	0 Proposal	0,00	93 Proposal	0 Proposal	16,67 %	
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persepsi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100 %	91,67 %	100 %	91,67 %	91,67	100 %	33,33 %	100,00 %	
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan hibah, bansos dan bantuan keuangan yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	0 Laporan	100,00 %	
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan/LKT yang Disusun	4 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00 %	
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan realisasi DBH CHT yang disusun	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0 Laporan	0,00 %	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persepsi pengelolaan BMD yang terarah dan akurat oleh Perangkat Daerah	100 %	91,43 %	80 %	91,43 %	114,29	85 %	70 %	0,85 %	
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100 %	15 %	85 %	15 %	17,65	85 %	0 %	0,85 %	
3.1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berkas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	1,00 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/comsums)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2011-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2020)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Pencapaian realisasi capaian target Daerah, Desember, Desember s/d tahun	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (2020)	Target Perangkat Daerah Tahun 2021)				
3.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perda	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	0	Dokumen	100,00
3.1.5	Peratausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	1	Laporan	100,00
3.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	3	Laporan	1	Laporan	33,33	3	Laporan	0	Laporan	100,00
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah kasus IPTGR yang ditangani	8	Kasus	1	Kasus	12,50	8	Kasus	3	Kasus	100,00
		Jumlah Tanah yang disertifikatkan	1103	Bidang Tanah	140	Bidang Tanah	23,57	140	Bidang Tanah	9	Bidang Tanah	12,69
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beralih kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran	85	Unit	20	Unit	200,00	10	Unit	58	Unit	11,76
3.1.11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah lahan (Tanah PT.KAI) Tersedia	1	Bidang Tanah Sewa	1	Bidang Tanah Sewa	100,00	1	Bidang Tanah Sewa	1	Bidang Tanah Sewa	100,00
		Jumlah BMD yang akan dihapuskan	6	Paket	0	Paket	0,00	0	Paket	0	Paket	0,00
3.1.12	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD	35	Perangkat Daerah	35	Perangkat Daerah	100,00	35	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	100,00
3.1.13	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD yang di Update	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	1	Laporan	100,00
3.1.14	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	35	Orang	0	Orang	0,00	35	Orang	0	Orang	100,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHHT	100	%	120,79	%	120,79	100	%	26,19	%	100,00
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	100	%	103,11	%	103,11	100	%	18,31	%	100,00
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	100	%	109,61	%	109,61	100	%	20,69	%	100,00
		Persentase objek pajak PBB - BPHHT yang terminalkan	20	%	4,16	%	20,80	20	%	0	%	100,00
		persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHHT yang terdapat yang terlayani	100	%	100	%	100,00	100	%	100	%	100,00
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	150	Wajib Pajak	37	Wajib Pajak	24,67	150	Wajib Pajak	574	Wajib Pajak	100,00
		persentase pengaduan wajib pajak daerah lainnya yang terlayani	100	%	100	%	100,00	100	%	100	%	100,00
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	9	Dokumen	100,00
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	80	%	70	%	102,94	70	%	11,67	%	87,50
		Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	1	Aplikasi	3	Aplikasi	300,00	1	Aplikasi	3	Aplikasi	100,00
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah SPT yang didistribusikan	480000	SPT	463000	SPT	99,57	465000	SPT	0	SPT	96,88
		Jumlah DHR yang didistribusikan	70	Box	0	Box	0,00	0	Box	0	Box	0,00
4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisa	2	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	0	Dokumen	150,00
4.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	650	Wajib Pajak	0	Wajib Pajak	0,00	150	Wajib Pajak	125	Wajib Pajak	23,08
		Jumlah alat sisten online pajak hotel dan restoran.	110	Unit	0	Unit	0,00	50	Unit	0	Unit	45,45
4.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran.	12	Kali	0	Kali	0,00	12	Kali	0	Kali	100,00
4.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	aplikasi yang di update	4	Aplikasi	0	Aplikasi	0,00	1	Aplikasi	4	Aplikasi	25,00
		Jumlah Dokumen Tentang Data Objek pajak yang dihasilkan	4	Dokumen	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	0	Dokumen	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2011-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2020)							Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target Daerah Desember 2020 s/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Objek Pajak	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Objek Pajak	Tingkat Realisasi (2020)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Objek Pajak		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Objek Pajak
4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2	100000	19378	85.000	Objek Pajak	19378	Objek Pajak	22,80	85,000	Objek Pajak	0	Objek Pajak	85,00
4.1.7	Pentiliran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan	2916	1288	486	Dokumen	1288	Dokumen	265,02	486	Dokumen	736	Dokumen	16,67
4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Yang Terjadi	7000	25	7000	Objek Pajak	25	Objek Pajak	0,36	7000	Objek Pajak	30	Objek Pajak	100,00
4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	8000	5700	5000	Objek Pajak	5700	Objek Pajak	114,00	5000	Objek Pajak	4615	Objek Pajak	62,50
4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	3000	500	983	Objek Pajak	500	Objek Pajak	50,86	983	Objek Pajak	300	Objek Pajak	32,77
4.1.11	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	4200	7188	4200	Dokumen	7188	Dokumen	171,14	4200	Dokumen	5624	Dokumen	100,00
			12	0	12	Laporan	0	Laporan	0,00	12	Laporan	9	Laporan	100,00
4.1.12	Penylesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	93	0	93	Laporan	0	Laporan	0,00	93	Laporan	0	Laporan	100,00
			345	1120	345	Dokumen	1120	Dokumen	324,64	345	Dokumen	0	Dokumen	100,00
4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah reklame yang diterbitkan	10	0	10	Reklame	0	Reklame	0,00	10	Reklame	0	Reklame	100,00
			60	60	60	Wajib Pajak	60	Wajib Pajak	100,00	60	Wajib Pajak	7	Wajib Pajak	100,00

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD**  
**Kabupaten Pangandaran**

Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKD						Realisasi Capaian						Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
1.1	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%		90	91	92	93	94	95	0	0	0	0	0	0	
1	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%		96	97	98	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%		80	85	90	95	96	96	0	0	0	0	0	0	
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%		90	92	95	97	97	97	0	0	0	0	0	0	
	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%		90	92	95	97	98	98	0	0	0	0	0	0	
1.1	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%		90	92	95	97	98	98	0	0	0	0	0	0	
1.1	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%		90	92	95	97	98	98	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	
1.1.6	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Dokumen		4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	
1.2	1. Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%		80	82	85	90	99	99	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang		50	60	70	80	80	80	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
1.2.7	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan		3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	
1.2.8	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
1.3	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	%		70	74	78	82	86	90	0	0	0	0	0	0	
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jenis		3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	
1.4	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%		5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	
1.4.7	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	
1.5	Persentase Administrasi kepegawainan Perangkat Daerah yang baik	%		90	93	95	97	99	99	0	0	0	0	0	0	
1.5.2	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Set		155	165	175	185	195	205	0	0	0	0	0	0	
1.5.4	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawainan yang dilaksanakan	Laporan		5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	
1.6	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%		85	90	92	94	96	99	0	0	0	0	0	0	



2.1.3	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	SKPD			35	36	35	36	35	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	SKPD			35	36	35	36	35	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Jumlah DPA SKPD yang di asistensi	SKPD			35	36	35	36	35	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi	SKPD			35	36	35	36	35	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7	Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	Dokumen			2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Raperda dan Perda Tentang APBD yang disusun	Dokumen			2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	Dokumen			2	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Jumlah Raperbup dan Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Raperda dan Perda Tentang Perubahan APBD yang disusun	Dokumen			2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9	Jumlah Regulasi yang disusun (SE Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD, Perbup Hibah Bansos, Perbup BTT, Perbup Penganggaran melewat Tahun Anggaran)	SKPD			4	36	35	36	35	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen			25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0
2.1.11	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, Desa	Desa			29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0
2.1.12	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	SKPD			20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
2.1.13	Jumlah aparat yang mendapatkan pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	Orang			35	72	72	72	72	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>Persentase PD yang dilaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan</b>	<b>%</b>			<b>65</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>0</b>									
2.2.1	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Laporan Kas Umum Daerah yang Disusun	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Jumlah SKPD yang diterbitkan SPD dan Anggaran Kas nya	SKPD			35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Jumlah SKPD yang dikelola jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	SKPD			35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Dokumen Pengajuan Pencatran Hibah Bansos, Banku	Dokumen			8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	SKPD			35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Jumlah sistem Transaksi Non Tunai	Sistem			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Jumlah Dokumen: Laporan Realisasi Gaji PNS, Laporan PPK, Rekonsiliasi Gaji, Rekonsiliasi PPK, Laporan Realisasi Gaji PNS	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	SP2D			4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten	Orang			85	85	85	85	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0
2.3	<b>Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP (Aktual)</b>	<b>%</b>			<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>0</b>									
2.3.1	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	SKPD			9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd	SKPD			35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0







Tabel T.C.31.  
Review terhadap RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pangandaran

Lembar : ..... Dari : .....

No	Program/Kegiatan	Lokasi	RPD Indikator Kinerja	Target Capaian		Ragu Indikat (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisa Indikator Indikator Kinerja	Target Capaian		Ragu Indikat (Rp.000)	Catatan Penting
				5	6					9	10		
1	KEUANGAN												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91		326.432.341.415			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91		260.420.293.972	
			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	97	%	32.580.350.000			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	97	%	15.865.748.431	
			3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85					3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85			
			4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	92					4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	92			
			1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	92					1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	92			
			2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	92	%	137.500.000			2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	92	%	163.400.000	
			3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	92					3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	92			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4		82.500.000		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4		96.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cijulang	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4	Dokumen	55.000.000		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4	Dokumen	67.400.000	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	82	%	22.253.000.000		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	82	%	12.231.886.805	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	60	Orang	22.000.000.000		Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	60	Orang	12.135.886.805		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Cijulang	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	60.500.000		Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	66.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Cijulang	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1	Kegiatan	170.500.000		Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1	Kegiatan	10.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Cijulang	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	3	Laporan	11.000.000		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	3	Laporan	10.000.000		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Cijulang	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1	Laporan	11.000.000		Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1	Laporan	10.000.000		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	74		69.300.000		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	74		62.000.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Cijulang	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	3	Jenis	69.300.000		Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	3	Jenis	62.000.000		
	Kegiatan Administrasi Pendidikan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	5	%	78.650.000		Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	5	%	84.800.000		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	Laporan	78.650.000		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	Laporan	84.800.000		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	93	%	242.000.000		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	93	%	149.800.000		

No	RPD			RPD			RPD			Catatan Perlu
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat (Rp. 2018)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
		Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	165 Set	170.500.000	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	165 Set	50.000.000
		Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	5 Laporan	71.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	5 Laporan	99.800.000
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Perentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik</b>		<b>1.286.700.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Perentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>90 %</b>	<b>726.000.000</b>
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Jenis	46.200.000	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Jenis	9.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	100 Jenis	775.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	100 Jenis	300.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	88.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	50.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	27.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	7.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	120 Laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	120 Laporan	360.000.000
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Perentase pengadaan Barang Milik Daerah yang teralisasi</b>	<b>25 %</b>	<b>6.331.800.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Perentase pengadaan Barang Milik Daerah yang teralisasi</b>	<b>25 %</b>	<b>565.189.642</b>
	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 Unit	2.791.800.000	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 Unit	0
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	2.900.000.000	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	0
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak bermotor	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	0 Unit	275.000.000	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	0 Unit	0
	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah mebel yang diadakan	15 Jenis	308.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah mebel yang diadakan	15 Jenis	100.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	25 Unit	407.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	25 Unit	125.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	250.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	340.189.642
	<b>Kegiatan/penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Perentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>		<b>955.200.000</b>	<b>Kegiatan/penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Perentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>87 %</b>	<b>1.083.200.000</b>
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah jasa Surat Menyurat yang disediakan	1100 Buah	10.200.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah jasa Surat Menyurat yang disediakan	1100 Buah	4.000.000
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Rekening	495.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Rekening	550.000.000
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Orang	450.000.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Orang	529.200.000,00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Perentase prasarana yang baik dan layak fungsi</b>		<b>626.200.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Perentase prasarana yang baik dan layak fungsi</b>	<b>92 %</b>	<b>799.471.984</b>

No	Program/Kegiatan	RPD			Pagu Indikat (Rp. 2018)	Program/Kegiatan	Hasil Kerja/Indikator Kinerja			Pagu Indikat (Rp. 2018)	Catatan Penting		
		Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Target Capaian			Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Target Capaian				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	65	Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	65	Unit	317.471.984	
		Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah mebel yang dikelola	15	Jenis	24.200.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah mebel yang dikelola	15	Jenis	22.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	7	Jenis	176.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	7	Jenis	260.000.000	
		Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	7	Unit	176.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	7	Unit	200.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	85%	277.404.492.025,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	85%	237.263.077.537		
													Persentase keesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%	6.447.659.725,00	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%	3.145.318.358		
													Persentase skpd yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Dokumen KUA, PPAAS	2	512.149.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS	Jumlah Dokumen KUA, PPAAS	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Dokumen KUA, PPAAS	2	250.000.000		
													Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah RKA SKPD yang di asistansi	36	415.817.600,00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistansi	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah RKA SKPD yang di asistansi	36	200.000.000		
													Kab. Pangandaran, Cijulang
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah DPA SKPD yang di asistansi	36	428.549.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di asistansi	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah DPA SKPD yang di asistansi	36	200.000.000		
													Kab. Pangandaran, Cijulang
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Raperbub dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2	878.138.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbub dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Raperbub dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2	Dokumen	502.559.179	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Raperbub dan Perbup Perubahan APBD yang disusun	6	1.266.050.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbub dan Perbup Perubahan APBD yang disusun	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Raperbub dan Perbup Perubahan APBD yang disusun	6	Dokumen	502.559.179	



No	Program/Kegiatan			Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikat (Rp. 000)	Program/Kegiatan			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat (Rp. 000)	Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja									
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP (Aktual)	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP (Aktual)	9	262.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah	9	262.500.000		
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd	Pengandaran, Cijulang	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd	35	283.500.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd	35	283.500.000		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester / Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester / Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun	1	471.582.300	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester / Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun	1	471.582.300		
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun	1	1.039.500.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun	1	1.039.500.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Raportur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Raportur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1	997.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Raportur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1	997.500.000		
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten	85	299.250.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten	85	299.250.000		
	Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	85	262.500.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyuluan Bantuan Keuangan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah ajuan percairan dari 93 desa, kabupaten/provinsi	93	230.000.000.000		
	Analisis Perencanaan dan Penyuluan Bantuan Keuangan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah ajuan percairan dari 93 desa, kabupaten/provinsi	Analisis Perencanaan dan Penyuluan Bantuan Keuangan	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah ajuan percairan dari 93 desa, kabupaten/provinsi	93	230.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pangandaran, Cijulang	Penyediaan Dana Darurat	1	2.500.000.000,00		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pangandaran, Cijulang	Penyediaan Dana Darurat	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pangandaran, Cijulang	Penyediaan Dana Darurat	1	2.500.000.000,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah ajuan percairan dari 93 desa	93	30.000.000.000,00		
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah ajuan percairan dari 93 desa	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah ajuan percairan dari 93 desa	93	30.000.000.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100	230.400.000		
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100	230.400.000	Jumlah laporan hibah, bansos dan bantuan keuangan yang disusun	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah laporan hibah, bansos dan bantuan keuangan yang disusun	12			
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Laporan/LKT yang Disusun	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Laporan/LKT yang Disusun	4	510.166.000	Jumlah laporan realisasi DBH CHT yang disusun	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah laporan realisasi DBH CHT yang disusun	2			
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah Aplikasi pengelolaan keuangan daerah	1	2.100.000.000	Jumlah laporan realisasi DBH CHT yang disusun	Kab. Pangandaran, Cijulang	Jumlah laporan realisasi DBH CHT yang disusun	2			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akurat oleh Perangkat Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akurat oleh Perangkat Daerah	90%	2.634.047.336	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai standar	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai standar	90%	2.634.047.336		
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai standar	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai standar	100%	2.634.047.336							





**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten 2022**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pangandaran

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pantail Barat Desa Pangandaran, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pangandaran			
1.1	Pembangunan Jalan	Dusun Kamandilan RT 08 RW 02, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga			
1.2	Pengelolaan Leger Jalan	Dusun Jangraga, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga			
1.3	Pembangunan Jalan	Dusun Pamotan RT 004 RW 001, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Pamotan			
1.4	Pembangunan Jalan	Dusun Pamotan RT 003 RW 002, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Pamotan			
1.5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Cibiru, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ciwayang, Dusun Cikoraji, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
1.7	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Neglasari, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
1.8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Semua Dusun se Desa, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
1.9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Sindangjaya RT.023 RW.006, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya			
1.10	Pengelolaan Leger Jalan	Dusun Babakan, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya			
1.11	Rekonstruksi Jalan	Dusun Sindangjaya RT. 026, 027 RW 006, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya			
1.12	Rehabilitasi Jalan	Dusun Babakan, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya			
1.13	Pembangunan Jalan	dusun cimappg rt 03 rw 01, Kab. Pangandaran, Cigugur, Harumandala			
1.14	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Cintajaya RT 01 RW 01, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Cimangu			
1.15	Pembangunan Jalan	Jalan Karangkatapaang RT 002/RW 019 Dusun Budiasih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
1.16	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dusun Cikuya RT 05 RW 02 Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur, Kab. Pangandaran, Cigugur, Kertajaya			
1.17	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	wonoharjo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			
1.18	Pembangunan Jalan	jalan siliwangi s/d wonoharjo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			
1.19	Pembangunan Jalan	jalan siliwangi dusun wonoharjo s/d kedungrejo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			
1.20	Rehabilitasi Jalan	Dusun Karang Sari, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			
1.21	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Pananjung, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			
1.22	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Desa Pananjung, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			
1.23	Pembangunan Jalan	Dusun Karang Pete, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Kalijati			
1.24	Pembangunan Jalan	Dusun Cibanten Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cibanten			
1.25	Pembangunan Jalan	Dusun Gerewing RT 09 RW 03 Sambong s/d Batas Desa Ciulu, Kab. Pangandaran, Padaherang, Pasirgeulis			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.26	Rehabilitasi Jalan	Dusun Pasirgeulis RT 03 RW 01 Depan Desa Pasirgeulis s/d Batas Desa Jangraga-Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Padaherang, Pasirgeulis			
1.27	Penyediaan Pasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Karanglajadri, Kab. Pangandaran, Parigi, Karanglajadri			
1.28	Pembangunan Jalan	Dusun Pors dan Dusun Pasirlaja, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya			
1.29	Pembangunan Jembatan	Dusun Pasirlaja dan Dusun Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya			
1.30	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dusun Pagerbumi, Kab. Pangandaran, Cigugur, Pagerbumi			
1.31	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dusun Pasirmaan RT 02 RW 02, Kab. Pangandaran, Cigugur, Pagerbumi			
1.32	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Desa Bojong, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bojong			
1.33	Pembangunan Jalan	RT 001 RW 010 Dusun Cijalu Putaran Blok Martaita, Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			
1.34	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	RW 008 Blok Bagori Karangtengah, Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			
1.35	Penyediaan Pasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Desa Cisarua, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Cisarua			
1.36	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Karoya RT 03, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bungur Raya			
1.37	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Sukamiya, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Sukamiya			
1.38	Pembangunan Sistem Drainase perkotaan dan Lingkungan	Dusun Karangwangkal, Dusun Pasirmuncang, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			
1.39	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Banjarharja RT.08/03, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Banjarharja			
1.40	Pembangunan Jembatan	Dusun Emplak RT 01 RW 01 Desa Emplak, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Emplak			
1.41	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dusun Emplak Rt 03 Rw 01 Desa Emplak, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Emplak			
1.42	Pembangunan Jembatan	Dusun Cintasari Rt 02 Rw 07, Dusun Cintasari Rt 04 Rw 07, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintaratu			
1.43	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	desa mekarwangi, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Mekarwangi			
1.44	Peningkatan sarana dan pasarana serta kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Dusun Sukarenah RT 08 RW 08, Kab. Pangandaran, Padaherang, Padaherang			
1.45	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dusun Chideung, Kab. Pangandaran, Padaherang, Ciganjeng			
1.46	Pembangunan Jalan	Dusun Pasar, Kab. Pangandaran, Padaherang, Ciganjeng			
1.47	Rehabilitasi Jalan	Jl.Palatar Dusun Bojongmalang RT 02/07 Desa Karangbenda Kec.Parigi Kab.Pangandaran, Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			
1.48	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Blok Guha leles Dusun Pasirkiera Desa Karangbenda Kec.Pairgi, Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			
1.49	Pembangunan Jembatan	Dusun Bojong Rt 03 Rw 07 Blok Kedung Gabel, Kab. Pangandaran, Parigi, Bojong			
1.50	Pembangunan Jalan	Dusun Nnengkllok, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Palaten			
1.51	Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman	Dusun Karanghonje Desa Sindangwangi, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi			
1.52	Pembangunan Jalan	Dusun Karanghonje - Sindangsari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi			
1.53	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dusun Karanganyar Desa kertaharja, Kab. Pangandaran, Cimerak, Kertaharja			
1.54	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kantor Desa Ciparanti, Kab. Pangandaran, Cimerak, Ciparanti			
1.55	Penyediaan Pasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Kantor Desa Ciparanti, Kab. Pangandaran, Cimerak, Ciparanti			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.56	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Sukaresik, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			
1.57	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Sindanghari RT 02 RW 04, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jayasari			
1.58	Rehabilitasi Jalan	DUSUN EMPANGSARI RW 08, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang			
1.59	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Girisetra - Dusun Empangsari Desa Kalipucang, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang			
1.60	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Girisetra - Dusun Empangsari, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang			
1.61	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jalan Langkaplancar No. Dusun Limusununggal RT 011 RW 002 Desa Bangunjaya, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya			
1.62	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dusun Limusununggal RT 003 RW 001, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya			
1.63	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Ciparakan RT 003 RW 001 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Ciparakan			
1.64	Rehabilitasi Jalan	Dusun Kedungwuluh RT 14, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panutran			
1.65	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Purwosari RT 01/RW 03, Kab. Pangandaran, Cimerak, Mekarsari			
1.66	Rehabilitasi Jalan	Dusun Citembong Desa Cikalong, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikalong			
1.67	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Patrol RT 6 RW 2, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya			
1.68	Pembangunan Jalan	dusun bojongaren, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pagergunung			
1.69	Pembangunan Jembatan	Dusun Pondokmangir Rt 05 Rw 02, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pagergunung			
1.70	Pembangunan Jalan	Dusun Karangasri RT 04 RW 01, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Putrapinggan			
1.71	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dusun Bojong, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Putrapinggan			
1.72	Pembangunan Jalan	Dusun Kedungkuda - Desa Cibogo, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju			
1.73	Pembangunan Jalan	Dusun Sukaraja, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju			
1.74	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Purwasari Rt 20 Rw 07, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah			
1.75	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Renovasi, Uchahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dusun sukamanah Rt/Rw 02/01, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
1.76	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dusun Sukamanah Rt/Rw 02/01, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
1.77	Pembangunan Jalan	Jalan Inspeksi Kanan Ciseel - Dusun Sindangratu, Sindangkerta, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan			
1.78	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Desa Cimerak, Kab. Pangandaran, Cimerak, Cimerak			
1.79	Pembangunan Jembatan	Dusun Pondokklobok, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo			
1.80	Rehabilitasi Jalan	Dusun Pasirkored, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo			
1.81	Pembangunan Jalan	Dusun Pasirkored, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo			
1.82	Pembangunan Jalan	Dusun Nagrak RT.07/04, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangasri			
1.83	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Renovasi, Uchahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Girikanya Rt 003 Rw 001 Desa Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			
1.84	Pembangunan Jalan	Dusun Sukasari RT 40 RW 10, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sukanagara			
1.85	Rehabilitasi Jalan	Dusun Sukajadi, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sukanagara			
1.86	Rehabilitasi Jalan	DUSUN TEGALEGA RT.020 / RW.007, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur			
1.87	Rekonstruksi Jalan	Dusun Cipaku RT.031 RW.012, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.88	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	Rehabilitasi Saluran Gorong-gorong Jalan Raya Dusun Babakanjaya RT. 18 RW. 07, Kab. Pangandaran, Padaherang, Kedungwuluh			
1.89	Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman	Perbaikan Jaringan Air Bersih Dusun Cibuntu, Kab. Pangandaran, Padaherang, Kedungwuluh			
1.90	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	desa maruyungsari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Maruyungsari			
1.91	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Dusun Gikawung RW 12/13/14, Dusun Pepedan RW 15/16, Dusun Cikadu RW 17, Dusun Giriharja RW 10/11, Dusun Karangmukti RW 7/8/9, Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari			
1.92	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	RT 015 RW 005 Dusun Babakan, Kab. Pangandaran, Cimerak, Masawah			
1.93	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Desa Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan			
1.94	Penataan Administrasi Pemerintahan	dusun bojongkarekes dusun kamurang dusun kalapatiga dusun karanggedang dusun bojongsari, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan			
1.95	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	Dusun Karangmulya dusun pangolahan, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangmulya			
1.96	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	dusun karangmulya rt 05 rw 03, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangmulya			
1.97	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kantor desa karangmulya dusun karangmulya rt 05 rw03, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangmulya			
1.98	Rekonstruksi Jalan	dusun karangmulya-dusun pangolahan, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangmulya			
1.99	Rehabilitasi Jalan	Blok Pangangonan Dusun Bengkek Desa Sukahurip, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sukahurip			
1.100	Pembangunan Jalan	Dusun Sidahurip menuju Dusun Ciawi Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya			
1.101	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Ciawi, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya			
1.102	Pembangunan Jembatan	Dusun Sidahurip, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya			
1.103	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahtsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Karangbungur RT 05 Rw 02 Desa Bangunkarya, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunkarya			
2	Pembangunan Jalan	jalan lingkungan Desa Bunisari, Kab. Pangandaran, Cigugur, Bunisari			
2.1	Pembangunan Jalan	DUSUN KARANGANYAR, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Kaliati			
2.2	Pembangunan Jalan	POROS CITIKUR DESA KERSARATU, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Kaliati			
2.3	Pembangunan Jalan	RW 03 Dusun karangwangkal, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			
2.4	Pembangunan Jalan	DUSUN KARANGWANGKAL, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			
2.5	Pembangunan Jalan	RW 03 DUSUN KARANGWANGKAL, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			
2.6	Pembangunan Jalan	LINGKUNGAN KALENANAS DUSUN KR. HONJE, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			
2.7	Pembangunan Jalan	DUSUN CIBEUREUM, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			
2.8	Pembangunan Jalan	KALIBELO DUSUN CIBEUREUM, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			
2.9	Pembangunan Jalan	KALIBELO DUSUN CIMANGGU DESA CIKALONG KEC. SIDAMULIH, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikalong			
2.10	Pembangunan Jalan	KALIBELO DUSUN CIMANGGU DESA CIKALONG KEC. SIDAMULIH, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikalong			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.11	Pembangunan Jalan	JALUR TARIK KOLOT CIKANGKUNG DUSUN TARIKOLOT, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Pajaten			
2.12	Pembangunan Jalan	DUSUN DRAWOLONG, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Pajaten			
2.13	Pembangunan Jalan	SODONG DUSUN KARANNG ANYAR, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			
2.14	Pembangunan Jalan	Rt 01 Rw 12 Dusun Pasir Murcang Desa Sidamulih, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			
2.15	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Dusun Ciwangkal Rt 04/Rw 01 Desa Cimindi kec. cigugur, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.16	Rekonstruksi Jalan	Dusun Nagrak RT.08 RW.04, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karang Sari			
2.17	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Desa Karang Sari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karang Sari			
2.18	Rekonstruksi Jalan	Sukamanah RT. 21, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karang Sari			
2.19	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Sukamanah, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karang Sari			
2.20	Peningkatan Pengelolaan Sumber-sumber Air	Sapuangin, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karang Sari			
2.21	Pembangunan Jalan	Dusun Cogekan, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Kertajaya			
2.22	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Desa Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan			
2.23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan			
2.24	Rekonstruksi Jalan	Dusun Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan			
2.25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Bojongkondang, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bojongkondang			
2.26	Rekonstruksi Jalan	pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			
2.27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			
2.28	Rekonstruksi Jalan	lankaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			
2.29	Pemeliharaan Rutin Jalan	Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			
2.30	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			
2.31	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Karangkamiri, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Karangkamiri			
2.32	Rehabilitasi Jalan	Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan			
2.33	Rekonstruksi Jalan	Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar, Seluruh Kelurahan/Desa			
2.34	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Dusun Karanggedang RT 04 RW 06, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan			
2.35	Rekonstruksi Jalan	Ds. mangunjaya kec. mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya			
2.36	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	dsn. hegarmamah Ds. sindangjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya			
2.37	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	ds sindangjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya			
2.38	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Cintajaya, Kab. Pangandaran, langkaplancar, Cimanggu			
2.39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dusun Cisagu RT 01 RW 03, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadimulya			
2.40	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	bulakgebang RT 06 RW 04 Dusun Bulakgebang, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya			
2.41	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	dsn. bulakgebang rt.006 rw.004, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya			
2.42	Pembangunan Jalan	dsn. babakanjaya rt.002 rw.005, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya			
2.43	Rekonstruksi Jalan	sukajaya, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya			
2.44	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	dsn. patrol rt 03 rw 01, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.45	Pembangunan Jalan	DESA KARANG PAWITAN, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan			
2.46	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	dusun bunisinga desa sukamaju, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju			
2.47	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	batas desa karangpawitan dan sukamaju, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan			
2.48	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Cogreg dusun bunisinga desa sukamaju, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju			
2.49	Pembangunan Jalan	desa mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya			
2.50	Pembangunan Jalan	Desa Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya			
2.51	Rekonstruksi Jalan	Dusun Cukangaleuh Rt 01 Rw 06, Kab. Pangandaran, Parigi, Parakamunggu			
2.52	Rekonstruksi Jalan	Dusun Dukuh Dua Rt 01 Rw 08, Kab. Pangandaran, Parigi, Parakamunggu			
2.53	Rekonstruksi Jalan	Dusun Dukuh Satu Rt 02 Rw 11, Kab. Pangandaran, Parigi, Parakamunggu			
2.54	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dusun Budiasih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.55	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dusun Budiasih Rw 20, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.56	Pembangunan Jalan	Dusun Budiasih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.57	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dusun Budiasih Rw 017, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.58	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dusun Budiasih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.59	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.60	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.61	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Renovasi, Uchahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.62	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.63	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dusun Patrol, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.64	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Dusun Patrol Rt 01 Rw 02, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.65	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun Sinaralih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.66	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dusun Sucean, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.67	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun Sucean, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.68	Pembangunan Jalan	Dusun Sucean, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda			
2.69	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Renovasi, Uchahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa			
2.70	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	desa wonoharjo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			
2.71	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	RT 05 RW 01 DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.72	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.73	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Daya Saing Bidang Keolahragaan	DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.74	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.75	Rehabilitasi Jalan	RT 05 RW 03 DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.76	Rehabilitasi Jalan	RT 04 RW 03 DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.77	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Desa Karang Benda, Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			
2.78	Rekonstruksi Jalan	Desa Karangari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangari			
2.79	Pengelolaan Leger Jalan	Panyutran, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.80	Rekonstruksi Jalan	Desa Panyutran, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran			
2.81	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Panyutran, Kab. Pangandaran, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa			
2.82	Rekonstruksi Jalan	Desa Panyutran, Kab. Pangandaran, Panyutran			
2.83	Rekonstruksi Jalan	Desa Pasir Geulis, Kab. Pangandaran, Padaherang, Pasirgeulis			
2.84	Rekonstruksi Jalan	Desa Sindangwangi, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi			
2.85	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Dusun Patinggen II, Kab. Pangandaran, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa			
2.86	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Dusun Patinggen I, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan			
2.87	Pembangunan Jalan	Dusun Sindangkerta, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan			
2.88	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun Bojongsari, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan			
2.89	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun Nagrak Rt 02 Rw 01, Kab. Pangandaran, Padaherang, Padaherang, Seluruh Kelurahan/Desa			
2.90	Rehabilitasi Jalan	Blok pasir angin, area apodeling putrappingan PT PN VIII, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Banjarharja			
2.91	Rehabilitasi Jalan	Dusun Karangasri Rt. 02 Rw.02, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			
2.92	Rehabilitasi Jalan	Dusun Cikulu Rt.03 Rw.01, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sukahurip			
2.93	Rehabilitasi Jalan	Dusun Karang anyar Rt.05 Rw.03 dan dusun sukajadi Rt.04 Rw.02, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.94	Rehabilitasi Jalan	Jalan Cibarengkok Rt.04 Rw. 01 Dusun Cintamaju, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Tunggalis			
2.95	Rekonstruksi Jalan	Jalan lingkungan Karangjati Rt.03 Rw.01 Dusun Bulakbanjar, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Banjarharja			
2.96	Rekonstruksi Jalan	Jalan lingkungan Rt.03 Rw. 03 Dusun Karanganyar, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.97	Rekonstruksi Jalan	Jalan lingkungan Rt. 02 Rw. 06 Kandangmenjangan Dusun Bojongsari, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			
2.98	Rekonstruksi Jalan	RT/Rw 07/02 Dusun kamanjilan,Desa .Jangraga Kec.Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga			
2.99	Rekonstruksi Jalan	Jin. Lingkungan Rt/Rw : 041/011 Dusun Pangasinan Desa Jangraga Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga			
2.100	Rekonstruksi Jalan	Jin lingkungan Rt/Rw 12/03 Dsn.Kamandian Desa.Jangraga Kec.mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga			
2.101	Rekonstruksi Jalan	Jin.Lingkungan RT/RW 030/04 Dusun.Gimbal Desa.Mangunjaya Kec.Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya			
2.102	Rekonstruksi Jalan	Jin.Lingkungan RT/RW 025/04 Dsn.Gimbal Desa.Mangunjaya Kec.Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya			
2.103	Rehabilitasi Jalan	Dusun Babakan RT.005-006 RW.002 Desa Sindangjaya Kec.Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya			
2.104	Rekonstruksi Jalan	Jln Mesjid marjuned RT/RW 05/09 Dusun Sukaraja Desa Sukamaju Kec.Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju			
2.105	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dusun Cibuntu Rt.16 Rw.06, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bojongkondang			
2.106	Pembangunan Jalan	Dusun Cihideung, RW 007, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kab. Pangandaran, Padaherang, Ciganjeng			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.107	Pembangunan Jalan	Dusun Pasar, RW 001, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kab. Pangandaran, Padaherang, Ciganjeng			
2.108	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	desa Parigi, Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			
2.109	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	desa paledah, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah			
2.110	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	RT 13 RW 05, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah			
2.111	Rehabilitasi Jalan	Dusun Purwasari RT 18 RW 06, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah			
2.112	Rehabilitasi Jalan	Dusun Purwasari RW 21 RT 07, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah			
2.113	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Cibadak, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah			
2.114	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jalan Pasar Bogor - Mekariya, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah			
2.115	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jalan Bendung Manganti No 291 Maruyungsari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Padaherang, Seluruh Kelurahan/Desa			
2.116	Pembangunan Jalan	Dusun Mekarsari Jalan Pasar Desa Maruyungsari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Maruyungsari			
2.117	Pembangunan Jalan	Dusun Anggaraksan, Kab. Pangandaran, Padaherang, Maruyungsari			
2.118	Pembangunan Jalan	Dusun Sukasari Blok 40, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sukanagara			
2.119	Rekonstruksi Jalan	Dusun Nagrak Rt. 007 Tambaksari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karang Sari			
2.120	Pembangunan Jalan	Dusun Sindangsari, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju			
2.121	Pembangunan Jalan	Dusun Sindangsari, Kab. Pangandaran, Sukamaju			
2.122	Pembangunan Jalan	Dusun Sindangsari, Kab. Pangandaran, Sukamaju			
2.123	Pembangunan Jalan	Dusun Sindangsari, Kab. Pangandaran, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa			
2.124	Pembangunan Jalan	Dusun Bunisinga, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju			
2.125	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	dusun maruyungsari rt 13/06, Kab. Pangandaran, Padaherang, Maruyungsari			
2.126	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dusun Nagrak Rt.07 Rw.04, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karang Sari			
2.127	Pembangunan Jalan	RT 26 RW 06 Dusun Cimandeg, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran			
2.128	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	RT 20 RW 05 Dusun Balater, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran			
2.129	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	RT 06 RW 02 Dusun Panyutran, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran			
2.130	Pembangunan Jalan	RT 17 RW 02 Dusun Kedungwuluh, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran			
2.131	Pembangunan Jalan	RT 08 RW 02 Dusun Panyutran, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran			
2.132	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Desa Ciakar, Kab. Pangandaran, Cijulang, Ciakar			
2.133	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Desa Sidomulyo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo			
2.134	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Desa Sidomulyo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo			
2.135	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Desa Purbahayu, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.136	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Desa Purbahayu, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.137	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengadaan Ambulans Desa 1 unit Desa Purbahayu Rp 350.000.000, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			
2.138	Pembangunan Jalan	Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.139	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Dusun Borengkok Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.140	Rehabilitasi Jalan	Bojongkarekesi rt/rw 04/13 Ds Babakan, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan			
2.141	Pembangunan Jalan	dsn.cipancur rt.002 rw.004, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.142	Pembangunan Jalan	dsn.cibiru rt.04 rw.02, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.143	Pembangunan Jalan	dsn.mekarsari rt.01 rw.03, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.144	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	ds.bunisar, Kab. Pangandaran, Cigugur, Bunisari			
2.145	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	nagrak,cigintung,cikoranji,mekarsari,mekarjaya,cirawa, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.146	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	cimindi, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.147	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	dsn.cikubang, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya			
2.148	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	dsn.ciawi, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya			
2.149	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	cintakarva, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya			
2.150	Rekonstruksi Jalan	cikoraji, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.151	Rekonstruksi Jalan	nagrak, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.152	Rekonstruksi Jalan	cigintung, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.153	Rekonstruksi Jalan	cirawa, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.154	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	ciwangkal, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.155	Rekonstruksi Jalan	cibiru, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			
2.156	Rekonstruksi Jalan	RT 24 RW 06 DUSUN KALENSARI DESA KONDANGJAJAR KEC. CIJULANG, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			
2.157	Rekonstruksi Jalan	DUSUN BANTARKAWUNG RT 02 RW 08 DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kertayasa			
2.158	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DUSUN BANTARKAWUNG RT 03 RW 07 DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KAB. PANGANDARAN., Kab. Pangandaran, Cijulang, Kertayasa			
2.159	Pembangunan Jalan	JALAN PESANTREN ALHIDAYAH RT 02 RW08 DESA KERTAYASA KEC. CIJULANG KAB. PANGANDARAN., Kab. Pangandaran, Cijulang, Kertayasa			
2.160	Rekonstruksi Jalan	DUSUN BINANGUN KEC. CIJULANG, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			
2.161	Rekonstruksi Jalan	DUSUN BINANGUN, KALENSERI, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			
2.162	Rekonstruksi Jalan	dusun cikaler, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			
2.163	Rekonstruksi Jalan	DUSUN GARUNGGANG, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			
2.164	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	DUSUN KALENSERI, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			
2.165	Rekonstruksi Jalan	RT 05 RW 14 DUSUN NUSAGEDÉ, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			
2.166	Rekonstruksi Jalan	rt 04 rw 10 Dusun Nusagede Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.167	Rekonstruksi Jalan	DUSUN NUSAGEDÉ RT 02 RW 14, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.168	Rekonstruksi Jalan	DUSUN NUSAGEDÉ RT 04 RW 10, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.169	Rekonstruksi Jalan	DUSUN NUSA GEDE RT 01 RW 10 BLOK BOIONG DESA CIJULANG, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.170	Rehabilitasi Jalan	Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.171	Pembangunan Jalan	Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.172	Rekonstruksi Jalan	Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.173	Rekonstruksi Jalan	Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			
2.174	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Desa Cimindi, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.175	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Dsn Cikoranji Desa Cimindi kec Cigugur, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi			

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Nasional	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target
5													
5.2	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN						260.420.293.972				281.097.679.317		
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.865.748.431				15.636.646.438		
5.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						163.400.000				175.900.000		
5.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun					96.000.000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		4 Dokumen	103.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan					67.400.000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		4 Dokumen	72.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.231.886.805				11.666.218.650		
5.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan					12.135.886.805	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		60 Orang	11.562.718.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					66.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		5 Dokumen	70.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan					10.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Laporan	11.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun					10.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		3 Laporan	11.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun					10.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Laporan	11.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						62.000.000				66.100.000		
5.2.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola					62.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		3 Jenis	66.100.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Keuangan Perangkat Daerah						84.800.000				86.800.000		
5.2.1.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan retribusi Daerah					84.800.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		11 Laporan	86.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						149.800.000				161.300.000		
5.2.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan					50.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		165 Stel	55.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan					99.800.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		5 Laporan	106.300.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						726.000.000				798.600.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangket Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikator	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
5.2.1.2.06	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				6 Jenis	9.000.000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		6 Jenis	9.900.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.06	2. Penyediaan Perakatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Perakatan dan Peningkatan Kantor disediakan				100 Jenis	300.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		100 Jenis	330.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.06	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan				5 Jenis	50.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		5 Jenis	55.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.06	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				5 Jenis	7.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		5 Jenis	7.700.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.06	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				120 Laporan	360.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		120 Laporan	396.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah						565.189.642	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang				621.708.606	
5.2.1.2.07	4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan				50 Unit		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		50 Unit		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.07	5. Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan				15 Jenis	100.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		15 Jenis	110.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.07	6. Pengadaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				25 Unit	125.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		25 Unit	137.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.07	9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				3 Unit	340.189.642	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		3 Unit	374.208.606	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.083.200.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang				1.180.600.000	
5.2.1.2.08	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan				1100 Buah	4.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1100 Buah	4.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.08	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan				4 Rekening	550.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		4 Rekening	605.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.08	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Orang	529.200.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		12 Orang	571.200.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah						799.471.994	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang				879.419.182	

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangket Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana			Prioritas Nasional	Daerah
5.2.1.2.09	1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang disediakan	Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			65 Unit	317.471.984	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		65 Unit	349.219.182	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola			15 Jenis	22.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		15 Jenis	24.200.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola			7 Jenis	260.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		7 Jenis	286.000.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.1.2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi			7 Unit	200.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		7 Unit	220.000.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>							<b>237.263.077.537</b>				<b>258.427.925.269</b>	
5.2.2.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>							<b>3.145.318.556</b>				<b>3.324.853.805</b>	
5.2.2.2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA,PPAS			2 Dokumen	250.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		2 Dokumen	252.000.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA, PPASP			2 Dokumen	250.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		2 Dokumen	252.000.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi			36 SKPD	200.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		36 SKPD	201.600.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi			36 SKPD	200.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		36 SKPD	201.600.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di asistensi			36 SKPD	200.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		36 SKPD	201.600.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di asistensi			36 SKPD	250.000.000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		36 SKPD	252.000.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun			2 Dokumen	502.559.179	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		2 Dokumen	528.253.805	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Jumlah Raperda dan Perda Tentang APBD yang disusun			2 Dokumen		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			2 Dokumen		
5.2.2.2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperbup dan Perbup Perubahan APBD yang disusun			12 dokumen	502.559.179	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		12 dokumen	630.000.000	BAKADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Jumlah Raperbup dan Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun			6 Dokumen					6 Dokumen		
			Jumlah Raperda dan Perda Tentang Perubahan APBD yang disusun			2 Dokumen					2 Dokumen		

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Praktiran Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2023		Perangkit Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target
5.2.2.2.01	9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	Jumlah Regulasi yang disusun (SE Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD, Perbup Hibah Bansos, Perbup BTKJ, Perbup Penganggaran melewati Tahun Anggaran)				36 SKPD	150.000.000	Kab. Panganda ran, Gjulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			36 SKPD	151.200.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				1 Dokumen	204.800.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			1 Dokumen	211.200.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				93 Desa	235.400.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			93 Desa	241.800.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				36 SKPD	100.000.000	Kab. Panganda ran, Gjulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			36 SKPD	100.800.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.01	13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah aparat yang mendapatkan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten				72 Orang	100.000.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			72 Orang	100.800.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						993.200.000						1.004.440.000	
5.2.2.2.02	1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun				12 Dokumen	500.000.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			12 Dokumen	505.000.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.02	4 Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah Laporan Kas Umum Daerah Yang Disusun				12 Dokumen		Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang				12 Dokumen		
5.2.2.2.02	9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SKPD yang Dikeleola jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan belanja langsung				35 SKPD	232.800.000	Kab. Panganda ran, Gjulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			35 SKPD	235.368.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah				4700 SP2D	260.400.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			4700 SP2D	264.072.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.03	1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah				9 SKPD	172.000.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			9 SKPD	175.440.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.03	2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd				35 SKPD	240.359.179	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			35 SKPD	243.141.805	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.03	3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trmwilatan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun				1 Dokumen	350.000.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			1 Dokumen	353.500.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.03	4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran Yang disusun				1 Dokumen	948.800.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			1 Dokumen	967.776.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.2.2.03	5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperbup Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun				1 Dokumen	520.000.000	Kab. Panganda ran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			1 Dokumen	525.200.000	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkit Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
5 2 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	230.653.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Dokumen	251.301.217.659	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2.04	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten/provinsi	Jumlah ajuan percairan dari 93 desa, kabupaten/provinsi	93 Proposal			93 Proposal	200.000.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		93 Proposal	220.000.000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2.04	Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran Dana Darurat	1 Tahun			1 Tahun	7.500.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Tahun	7.500.000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2.04	10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah ajuan percairan dari 93 desa	93 Proposal			93 Proposal	23.163.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		93 Proposal	23.801.217.659	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2.05	Pengelelolan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						230.400,000	Kab. Cijulang				232.356,000	
5 2 2 2.05	1 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan hibah, bansos dan bantuan keuangan yang disusun	12 Laporan			12 Laporan	96.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		12 Laporan	97.224,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Jumlah laporan/KTI yang disusun	4 Laporan			4 Laporan		Kab. Cijulang			4 Laporan		
		Jumlah laporan realisasi DBH CHT yang disusun	2 Laporan			2 Laporan		Kab. Cijulang			2 Laporan		
5 2 2 2.05	2 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah	1 Aplikasi			1 Aplikasi	134.400,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Aplikasi	135.132,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 3 2.01	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						3.327.559,179	Kab. Cijulang				3.359.653,805	
5 2 3 2.01	3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berkas Penyusunan Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	37.559,179	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Dokumen	39.000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 3 2.01	4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perda	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Dokumen	50.000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 3 2.01	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset	1 Laporan			1 Laporan	90.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Laporan	90.000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 3 2.01	6 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	1 Laporan			1 Laporan	930.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Laporan	250.000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 2 3 2.01	7 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah kasus TPRGR yang ditangani	8 Kasus			8 Kasus	520.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		8 Kasus	995.653,805	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Jumlah Tanah yang disertifikasikan	140 Bidang Tanah			140 Bidang Tanah		Kab. Cijulang			140 Bidang Tanah		
5 2 3 2.01	10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang akan dihapuskan	6 Paket			6 Paket	1.050.000,000	Kab. Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH		6 Paket	1.200.000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkit Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Target	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipindahtugaskan (Balik Nama) ke Kabupaten Pangandaran				15 Unit					15 Unit		
		Jumlah lahan (Tanah PT,KK) Tersedia				1 Bidang Tanah Sewa					1 Bidang Tanah Sewa		
5.2.3.2.01	11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD				35 Perangkat Daerah	250.000.000	Kab. Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		35 Perangkat Daerah	435.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.3.2.01	12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD yang di update				1 Laporan	200.000.000	Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Laporan	100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.3.2.01	13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek				35 Orang	200.000.000	Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		35 Orang	200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
<b>5.2.4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>						<b>3.963.908.825</b>				<b>3.973.453.805</b>		
<b>5.2.4.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>						<b>3.963.908.825</b>				<b>3.973.453.805</b>		
5.2.4.2.01	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola				1 Aplikasi	516.600.000	Kab. Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Aplikasi	516.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Jumlah DKRP yang didistribusikan				70 Box					70 Box		
		Jumlah SPT yang didistribusikan				470000 SPT					470000 SPT		
5.2.4.2.01	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Aplikasi Yang di Update				1 Aplikasi	204.793.197	Kab. Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Aplikasi	204.793.197	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.4.2.01	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				250 Wajib Pajak	250.000.000	Kab. Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		250 Wajib Pajak	250.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.4.2.01	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah alat sistem online pajak hotel dan restoran.				20 unit	50.000.000	Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		20 unit	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran.				12 kali					12 kali		
5.2.4.2.01	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	aplikasi yang di update				1 Aplikasi	155.000.000	Kab. Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		1 Aplikasi	155.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Tentang Data Objek pajak yang dihasilkan				1 Dokumen					1 Dokumen		
5.2.4.2.01	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data Objek Pajak dan				20000 Objek Pajak	244.593.196	Kab. Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		20000 Objek Pajak	268.140.509	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.2.4.2.01	7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan				486 Dokumen	485.800.000	Kab. Pangandaran, Cilulang, Cilubar	PENDAPATAN ASU DAERAH		486 Dokumen	491.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5.2.4.2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak			6000 Objek Pajak	284.142.842	Kab. Pangandaran, Cilulang, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			6000 Objek Pajak	246.593.197	BAKOP PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	
5.2.4.2.01	10	Pemeliharaan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring			1500 Objek Pajak	200.000.000	Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			1500 Objek Pajak	200.000.000	BAKOP PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	
5.2.4.2.01	11	Pengajian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengajian Pajak Daerah			4200 Dokumen	987.787.795	Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			4200 Dokumen	994.535.902	BAKOP PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	
			Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah			93 Laporan						93 Laporan			
			Jumlah laporan realisasi PBB-P2			12 Laporan						12 Laporan			
5.2.4.2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mulus Objek Pajak			345 Dokumen	151.569.000	Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASU DAERAH			345 Dokumen	160.969.000	BAKOP PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	
			Jumlah reklame yang diterbitkan			10 Reklame		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang				10 Reklame			
5.2.4.2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa			60 Wajib Pajak	433.222.795					60 Wajib Pajak	433.222.000	BAKOP PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	